

BAB II

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BOGOR

2.1 Gambaran Umum Kota Bogor

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Bogor terletak diantara 106°48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Bogor Selatan (30,81 km²), Kecamatan Bogor Timur (10,15 km²), Kecamatan Bogor Utara (17,72 km²), Kecamatan Bogor Tengah (8,13 km²), Kecamatan Bogor Barat (32.85 km²) dan Kecamatan Tanah Sareal (18,84 km²).

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi beberapa kecamatan di Wilayah Kabupaten Bogor

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor

2.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk Kota Bogor hasil Sensus Penduduk 2020 September terdapat 1.043.070 jiwa penduduk dengan komposisi penduduk Laki-

laki sebanyak 529.236 jiwa dan Perempuan sebanyak 513.834 jiwa. Dengan RJK (Rasio Jenis Kelamin) sebesar 103,0 berarti penduduk Laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk Perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020
Bogor Selatan	204.030	104,9	1,25
Bogor Timur	104.327	102,9	0,97
Bogor Utara	186.724	103,5	0,96
Bogor Tengah	96.528	101,3	-0,51
Bogor Barat	233.637	102,1	1,06
Tanah Sereal	218.094	102,5	1,42
Kota Bogor	1.043.070	103,0	0,98

Sumber: kotabogor.bps.go.id

Pada tabel 2.1, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2020 terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 233.637 penduduk dan jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2020 paling sedikit berada di Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah 96.528 penduduk.

2.1.3 Kondisi Ekonomi

Ekonomi Pemerintah Kota Bogor setiap tahun menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, sektor pariwisata, pajak, dan lain lain.

**Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Bogor
Menurut Jenis Pendapatan, 2014-2016**

Jenis Penerimaan Receipt Items	2014 (Juta/Million Rp)	2015 (Juta/Million Rp)	2016 (Juta/Million Rp)	Kenaikan 2016 terhadap 2015 (%)
A. Pendapatan Daerah				
1. Pendapatan Asli Daerah	544.835,70	627.597,05	681.623,90	8,61
1.1 Pendapatan Pajak Daerah	376.487,55	398.435,40	447.951,03	12,43
1.2 Hasil Retribusi Daerah	77.167,65	46.219,89	56.982,63	23,29
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.681,53	28.807,74	15.996,86	-44,47
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	67.498,97	154.134,02	160.693,38	4,26
2. Dana Perimbangan	855.645,93	814.953,43	1.247.772,42	53,11
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	89.831,37	68.503,72	92.553,28	35,11
2.2 Dana Alokasi Umum	732.337,06	737.833,16	806.089,54	9,25
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	33.477,50	8.616,56	349.129,60	3.951,84
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	357.215,75	470.659,91	201.530,55	-57,18
B. Pembiayaan Daerah	302.181,96	301.204,91	255.436,05	-15,20

Jumlah/Total	2.059.879,34	2.214.415,31	2.386.362,91	7,76
--------------	--------------	--------------	--------------	------

Sumber: kotabogor.bps.go.id

Dari tabel 2.2 menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan pemerintah Kota Bogor dengan total sebesar 7.76 persen dari tahun sebelumnya. Total kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berbagai pendapatan daerah yang meningkat seperti pendapatan asli daerah, pajak daerah, hasil retribusi daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) lainnya yang sah, dan berbagai pendapatan dari dana perimbangan seperti bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

Tabel 2.3 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bogor 2008-2014

Tahun/ Year	Kunjungan ke obyek wisata			Menginap di Hotel		
	Wisatawan/Tourist		Jumlah/ Total	Wisatawan/Tourist		Jumlah/ Total
	Nusantara/ Domestic	Mancanegara /Foreign		Nusantara/ Domestic	Mancanegara/ Foreign	
2008	1.370.119	18.174	1.388.293	716.807	31.443	748.250
2009	1.163.110	42.377	1.205.487	1.086.374	102.737	1.189.111
2010	1.524.044	42.812	1.566.856	1.205.628	104.076	1.309.704
2011	1.630.687	43.837	1.674.524	1.309.875	106.137	1.416.012
2012	1.775.580	110.975	1.886.555	1.426.263	104.223	*)1530486
2013	3.277.442	104.780	3.382.222	1.632.657	99.446	*)1732103
2014	4.148.650	202.280	4.350.930	2.896.749	124.108	3.020.857

Sumber: kotabogor.bps.go.id

Dari data yang ditunjukkan tabel 2.3, terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bogor setiap tahunnya. Pada tahun 2008 sampai tahun 2014, menurut data yang tercatat di kotabogor.bps.go.id jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata Kota Bogor mengalami peningkatan dari 1.388.293 orang menjadi 4.350.930 orang dan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang menginap di hotel Kota Bogor mengalami peningkatan dari 748.250 orang menjadi 3.020.857 orang.

2.2 Mal Pelayanan Publik Kota Bogor

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan *high-cost economy* (ekonomi biaya tinggi). Banyaknya permasalahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik adalah hasil inovasi pelayanan publik dari produk pelayanan terdahulunya. Generasi Pelayanan Publik Terpadu adalah inovasi.

Pelayanan publik generasi pertama, lalu generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) maupun swasta. Mal Pelayanan Publik Kota Bogor diresmikan pada 26 Agustus 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafrudin. Mal Pelayanan Publik Kota Bogor berlokasi di Lippo Plaza Keboen Raya Bogor Jl. Raya Pajajaran No.27, RT.03/RW.08, Babakan, Kecamatan

Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Definisi Mal Pelayanan Publik menurut Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara /Badan usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan Kenyamanan.

2.3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bogor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor adalah dinas yang mengurus tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bogor. Sesuai amanat Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2019, DPMPTSP Kota Bogor sebagai dinas yang bertanggung jawab dan mengatur kebutuhan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor. Dinas ini berlokasi di Jl. Kapten Muslihat No.21, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Berikut beberapa produk digitalisasi layanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor:

1. Pendaftaran online
2. Tracking service

3. Email gateway
4. Tanda tangan elektronik
5. Host to host pembayaran retribusi
6. Arsip digital
7. Layanan berbasis android
8. Cetak mandiri

1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

VISI

“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Transparan, Akuntabel, Dan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”

MISI

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
- c. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

2. Tugas Pokok dan

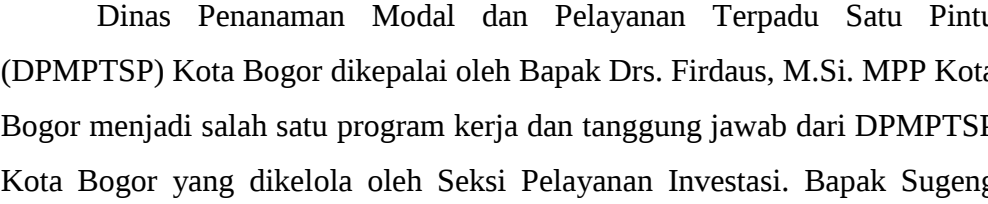
Fungsi TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2021



Rulyadi, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ibu Siti Maesaroh, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan Investasi bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dan kinerja MPP Kota Bogor

